



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

| | | | |
|---|---------------|----------------|------|
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | | | |
| SIL (KONSEP DASAR PKN) | | | |
| No. Dokumen | Revisi : 00 | Tgl. Berlaku | Hal. |
| Semester Gasal | Judul praktek | Jam pertemuan | |
| | - | 16 x 150 menit | |

C. Format isi silabus

| | |
|-----------------------|---|
| Nama Mata Kuliah | : Konsep Dasar PKN |
| Kode Mata Kuliah | : PSD 326 |
| SKS | : 3 Teori – 0 Praktek |
| Dosen | : 1. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd 2. Wuri Wuryandani, M.Pd. 3. Fathurrohman, M.Pd. |
| Program Studi | : S1 PGSD |
| Prasyarat | : - |
| Waktu Perkuliahan | : Semester Gasal |
| Deskripsi Mata Kuliah | : Mata kuliah Konsep Dasar PKn menyajikan konsep-konsep dasar yang cukup kompleks, baik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Konsep-konsep tersebut meliputi konsep mengenai dasar negara, konstitusi negara, hukum, politik, pemerintahan, persatuan dan kesatuan, dan globalisasi. |
| Pengalaman Belajar | : Pengalaman yang didapat mahasiswa adalah mengetahui konsep-konsep dasar dalam PKn dan hubungan konsep-konsep tersebut dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melalui pengalaman belajar inilah harapannya ketika sudah menjadi guru SD mahasiswa mampu menyampaikan konsep-konsep tersebut dengan benar sesuai dengan tingkat perkembangan anak. |

Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan

| Pertemuan | Tujuan Perkuliahan | Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan |
|-----------|--|--|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. Sejarah PKn 2. Visi, misi, fungsi PKn paradigma baru | 1. Sejarah PKn 2. Visi, misi, fungsi PKn paradigma baru |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara 2. proses perumusan Pancasila 3. nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 4. pengertian Pancasila sebagai | 1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara 2. Proses perumusan Pancasila 3. Nilai-nilai Pancasila 4. Ideologi terbuka |

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

| | | |
|---------------|---|--|
| | ideologi terbuka | |
| 3,4 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. terjadinya proklamasi kemerdekaan 2. hubungan dasar negara dan konstitusi 3. konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia | 1. Proklamasi kemerdekaan 2. Hubungan dasar negara dan konstitusi 3. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia |
| 5,6 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. norma yang berlaku dalam masyarakat 2. prinsip penyusunan Perda 3. sistem hukum dan peradilan nasional 4. hukum dan peradilan internasional | 1. Norma dalam masyarakat 2. Peraturan Daerah 3. Sistem hukum dan peradilan nasional 4. Hukum dan peradilan internasional |
| 7,8 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. pentingnya menghargai hak dan kewajiban anak 2. hak dan kewajiban anggota masyarakat 3. instrumen nasional dan internasional HAM 4. proses pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM | 1. Hak dan kewajiban anak 2. Hak dan kewajiban anggota masyarakat 3. Instrumen nasional dan internasional HAM 4. Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di Indonesia |
| 9 | Evaluasi mid semester | Ujian mid semester |
| 10,11 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. pemerintahan desa dan kecamatan 2. perbedaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat 3. pengertian demokrasi dan budaya demokrasi 4. pengertian sistem politik dan budaya politik 5. pengertian sistem pemerintahan 6. peranan pers dalam masyarakat demokratis | 1. Pemerintahan desa dan kecamatan 2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat 3. Demokrasi dan budaya demokrasi menuju masyarakat madani 4. Sistem politik dan budaya politik 5. Sistem pemerintahan 6. Peranan pers dalam masyarakat demokratis |
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. keunggulan yang dimiliki Indonesia 2. makna Sumpah Pemuda 3. pentingnya keutuhan NKRI 4. pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan | 1. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 2. Sumpah Pemuda 3. Keutuhan NKRI 4. Keterbukaan dan jaminan keadilan |
| Dibuat oleh : | Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh : |



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

| | | |
|-------|--|--|
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kebutuhan warga negara yang meliputi: 1. Harga diri sebagai warga masyarakat 2. Kebebasan berorganisasi 3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat 4. Prestasi diri 5. Persamaan kedudukan warga negara 6. Hidup aman dan damai | 1. Harga diri sebagai warga masyarakat 2. Kebebasan berorganisasi 3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat 4. Prestasi diri 5. Persamaan kedudukan warga negara 6. Hidup aman dan damai |
| 14,15 | Mahasiswa mampu menjelaskan: 1. globalisasi di lingkungannya 2. politik luar negeri Indonesia 3. dampak globalisasi 4. hubungan internasional dan organisasi internasional 5. cara mengevaluasi globalisasi | 1. Globalisasi 2. Politik LN Indonesia di era globalisasi 3. Dampak globalisasi 4. Hubungan dan organisasi internasional 5. Mengevaluasi globalisasi |
| 16 | Evaluasi Akhir Semester | UAS |

Evaluasi Hasil Belajar : Nilai akhir semester memuat komponen sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Partisipasi dan presentasi | : 20% |
| 2. Tugas mandiri/kelompok | : 20% |
| 3. UTS | : 20% |
| 4. UAS | : <u>40%</u> |
| Jumlah | : 100% |

Daftar Literatur/Referensi

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press
- Winataputra, Udin S. 2005. *Materi dan Pembelajaran PKN SD*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- C.S.T Kansil. 2004. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita
- , 2005. *Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manan, Bagir. 2005. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH. UII Press.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

| | | |
|---------------|---|------------------|
| Dibuat oleh : | Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh : |
|---------------|---|------------------|



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

Literatur tambahan

- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
Purwastuti, L Andrian, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press
Cipto, Bambang, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis
Diktilitbang
Saiful Arif, dkk. 2006. *Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
-----, 2007. *Budaya Politik Demokratis*. Malang: Averroes Press.
Abdullah Yazid, dkk. 2007. *Demokrasi dan HAM*. Malang: Averroes Press.

Dosen dapat dihubungi di:

1. HP. 081328015213
2. sekarpurbarini@yahoo.com

Yogyakarta, 2 September 2009

Mengetahui,
Ketua Jurusan PPSD FIP UNY

Dosen Pengampu Mata Kuliah
Konsep Dasar PKn

A.M. Yusuf , M.Pd.
NIP 130924378

Sekar Purbarini K, M.Pd.
NIP 19791212 200501 2 003

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

Handout 1: Pertemuan 1 dan 2

Pokok Bahasan : Pancasila

Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan Pancasila, proses perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Uraian :

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan Kausa Materialis (asal bahan) Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempunyai nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang jaman dan nilai instrumental yang mampu berkembang secara dinamis. Nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat tetap adalah cita-cita dan tujuannya, yaitu pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai instrumental Pancasila yang dapat berubah adalah pengembangan dan pengamalannya, yaitu penjabaran lebih lanjut dari pembukaan UUD 1945, sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Perubahan-perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasarnya. Sifat dinamis dan inovatif nilai-nilai instrumental memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Tugas:

Mengumpulkan dan menganalisis artikel dan berita dari koran tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Yogyakarta, September 2008
Pengembang Mata Kuliah
Penulis *Handout*

(Sekar Purbarini K, S.IP)
NIP.132313274

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

Handout 2: Pertemuan 3 dan 4

Pokok Bahasan : Konstitusi Negara
Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mampu menjelaskan terjadinya proklamasi kemerdekaan, hubungan dasar negara dan konstitusi, dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

Uraian :

Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 waktu Jawa, bertempat di rumah kediaman Ir. Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur (sekarang Jl. Proklamasi) No. 56 Jakarta, dihadiri sekitar 1000 tamu undangan yang terdiri atas seluruh anggota PPKI, golongan pemuda, para pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh masyarakat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari pelaksanaan proklamasi disebabkan oleh dua faktor (Iqbal Hasan, 2002:64):

1. Faktor subyektif, yaitu: (a) karena keyakinan bangsa Indonesia bahwa berkat rahmat Tuhan YME, perjuangan bangsa Indonesia untuk melenyapkan penjajahan berhasil dan mencapai kemerdekaan; (b) pada waktu itu, nasionalisme dan patriotisme dalam keadaan memuncak; (c) penderitaan rakyat yang sangat meluas dan merata.
2. Faktor obyektif, yaitu: (a) terjadinya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*), (b) waktu itu mata rantai imperialisme dan kolonialisme dalam posisi yang sangat lemah.

Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi dapat dilihat dari proses pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Pancasila dikemukakan dalam sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diterima secara bulat sebagai dasar negara bagi negara Indonesia Merdeka.
2. Namun, secara yuridis Pancasila diterima sebagai dasar negara Republik Indonesia setelah ada keputusan dari PPKI melalui sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu dengan menetapkan dan mengesahkan suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang telah merdeka itu.
3. UUD tersebut adalah UUD 1945, yang di dalam Pembukaannya terdapat rumusan Pancasila. Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945 sahlah Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar bagi negara.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia pernah memiliki 3 macam konstitusi:

1. UUD 1945 yang dimuat dalam Berita RI tahun II (1946) Nomor 7
2. Konstitusi RIS yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950
3. UUDS yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950

Tugas : Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah harus selalu berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah akhir-akhir ini cenderung kurang berpihak pada rakyat, khususnya jika dihubungkan dengan pasal 33 UUD 1945. Diskusikan pernyataan tersebut!

Yogyakarta, September 2008
Pengembang Mata Kuliah
Penulis *Handout*

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

(Sekar Purbarini K., S.IP)
NIP.132313274

Handout 3: Pertemuan 5 dan 6

Pokok Bahasan : Norma, Hukum, dan Peraturan

Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mampu menjelaskan norma yang berlaku dalam masyarakat, prinsip penyusunan Perda, sistem hukum dan peradilan nasional, serta hukum dan peradilan internasional

Uraian :

- Norma merupakan patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari, kita mengenal berbagai macam norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum.
- Dalam pembuatannya, Perda harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu antara lain sebagai berikut:
 1. Ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD (pasal 136 UU 32/2004)
 2. Dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
 3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 (Mahfud, 2006:21).
- Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara. Hukum internasional diberlakukan dalam rangka menjaga hubungan dan kerja sama antarnegara. Hukum internasional harus memperhatikan asas-asas: a) teritorial, b) kebangsaan, c) kepentingan umum.

Tugas : Diskusikan mengenai pelaksanaan sistem hukum dan peradilan nasional pada era kepemimpinan Presiden SBY!

Yogyakarta, September 2008
Pengembang Mata Kuliah
Penulis *Handout*

(Sekar Purbarini K., S.IP)
NIP.132313274

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

Handout 4: Pertemuan 7 dan 8

Pokok Bahasan : Hak Asasi Manusia

Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya menghargai hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, dan proses pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

Uraian :

- Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak – hak asasi lainnya. Hak asasi manusia selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat.
- Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989 yang telah dikomodasi dalam Undang-Undang HAM No.39/1999 Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar manusia, bagian kesepuluh tentang Hak anak menyebutkan hak-hak anak, yaitu : mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, mendapat pelayanan yang sama, dipelihara dan mengetahui orang tuanya, mendapat kewarganegaraan, mendapat perlakuan yang adil, mendapat perlindungan terhadap rahasia pribadi, Hak untuk mendapat kesempatan untuk berbicara, diperlakukan baik terhadap sesama, mendapat perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, mendapat pelayanan kesehatan dan mendapat pendidikan.
- Hak dan kewajiban anggota masyarakat tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 33.
- Instrumen nasional HAM meliputi:
 - a. UUD 1945
 - b. Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - c. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak
 - d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam
- Perkembangan untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya dinamika politik dalam negeri dan internasional. Oleh karena itu, di selain adanya pengaruh dari faktor-faktor subyektif dan obyektif seperti kepentingan nasional dan sejarah nasional, maka lingkungan eksternal yang dalam hal ini adalah sikap dan pandangan dunia internasional, turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Tugas: Sekarang ini, semakin banyak anak usia sekolah yang meminta-minta di pinggir jalan. Diskusikan fenomena ini apabila dikaitkan dengan hak-hak mereka yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak!

Yogyakarta, September 2008

Pengembang Mata Kuliah

Penulis *Handout*

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

(Sekar Purbarini K., S.IP)
NIP.132313274

Handout 5: Pertemuan 10

Pokok Bahasan : Kekuasaan dan Politik

Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mampu menjelaskan pemerintahan desa dan kecamatan, perbedaan antara pemda dan pempus, pengertian demokrasi dan budaya demokrasi, pengertian sistem politik dan budaya politik, pengertian sistem pemerintahan, dan peranan pers dalam masyarakat demokratis.

Uraian :

- Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa bukanlah pegawai sipil. Ia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Kepala desa dibayar dengan tanah kas desa yang biasa disebut dengan *bengkok*. Kepala desa boleh mengerjakan tanah itu selama ia menjabat. Bila ia pensiun, tanah itu akan dikembalikan ke pemerintah desa tersebut.
- Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa/kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota, dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- Menurut UU otonomi daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam bingkai NKRI.
- Kabinet adalah susunan penyelenggara pemerintahan negara di tingkat pusat. Kabinet terdiri dari presiden, wakil presiden, para menteri negara koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, menteri negara nondepartemen, serta pejabat tinggi setingkat menteri.
- Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang artinya pemerintahan. Dari pengertian tersebut kata demokrasi dapat diartikan pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat.
- Budaya demokrasi berarti menjadikan demokrasi sebagai satu budaya atau kebiasaan sehari-hari. Budaya demokrasi adalah pembiasaan sikap hidup secara demokratis. Hidup secara demokratis ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur *rule of law* atau syarat-syarat demokrasi.
- Sistem politik adalah alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
- Budaya politik menurut Almond dan Verba (1990) merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial. Dalam hal ini sistem politik.
- Sistem pemerintahan diartikan sebagai mekanisme kerja sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional maupun hubungan struktural.

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

- Dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui .
 - b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinnekaan.
 - c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
 - d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
 - e. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan

Tugas : Bagaimana pendapatmu dengan kebebasan pers setelah bergulirnya era reformasi?

Yogyakarta, September 2008
Pengembang Mata Kuliah
Penulis *Handout*

(Sekar Purbarini K., S.IP)
NIP.132313274

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

Handout 6: Pertemuan 11 dan 12

Pokok Bahasan : Persatuan dan Kesatuan

Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mampu menjelaskan keunggulan Indonesia, makna Sumpah Pemuda, pentingnya keutuhan NKRI, pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan.

Uraian :

- Keunggulan Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Memiliki tata krama atau keramahtamahan yang tidak dimiliki bangsa lain. Sejak dulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopannya sehingga menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia.
 - b. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
 - c. Keindahan alam Indonesia tak disangsikan lagi, seperti di pantai-pantai Bali, NTB, Sumatera (Danau Toba), Jawa Barat (Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu), dan sebagainya.
- Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia, sama-sama merasa berbangsa satu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia serta memiliki sejarah yang sama yaitu sejarah Indonesia.
- Semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia sehingga tetap utuh. Keutuhan wilayah sebuah negara sangat penting. Keutuhan wilayah suatu negara sangat menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan. Untuk itu, semua negara berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Usaha untuk menjaga keutuhan wilayah merupakan kewajiban semua warga negara termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan aparat keamanan.
- Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bila suatu negara terutama pejabat publik dan aparat penegak hukumnya mampu memperlakukan warganya dengan adil dalam segala bidang maka rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) warga negara memperkuat persatuan dan kesatuan dapat terwujud.

Tugas: Menurut pendapatmu, permasalahan apa yang paling rentan yang bisa menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan suatu bangsa?

Yogyakarta, September 2008
Pengembang Mata Kuliah
Penulis *Handout*

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

(Sekar Purbarini K., S.IP)

NIP.132313274

Handout 7: Pertemuan 13 dan 14

Pokok Bahasan : Kebutuhan Warga Negara

Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan kebutuhan warga negara.

Uraian :

- Kebutuhan warga negara antara lain meliputi harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara, hidup aman dan damai
- Harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Harga diri sering disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Seseorang dengan kesadarannya sendiri dapat menilai pribadi masing-masing dengan jujur. Harga diri manusia adalah harkat atau nilai manusia. Harga diri dibentuk dari hasil perenungan diri serta umpan balik yang diterima tentang dirinya dari orang lain.
- Hak berorganisasi secara tidak langsung tersirat dalam UUD 1945, terutama pasal 28 E ayat (3). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas memilih atau membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Tidak ada satu pihak pun yang boleh memaksa atau melarang seseorang untuk bergabung dengan suatu organisasi. Tetapi, sekali lagi, perlu diingat bahwa kebebasan itu tidak boleh mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
- Prestasi diri merupakan hasil dari usaha yang telah dicapai seseorang. Berprestasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak cara untuk mendapatkan prestasi. Setiap orang harus memahami bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Untuk dapat berprestasi juga perlu memiliki motivasi yang kuat.
- Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Warga negara juga memiliki hak konstitusional terkait dengan kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara, seperti perlindungan dan kepastian hukum yang adil, upaya pembelaah negara, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.
- Hidup aman dan damai merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap warga negara Indonesia. Kegiatan pembangunan akan berjalan lancar jika keadaan negara aman dan damai. Rakyat dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tenang dan leluasa

Tugas: Sebagai seorang mahasiswa, kebutuhan warga negara yang mana yang merupakan prioritas utama untuk segera dipenuhi?

Yogyakarta, September 2008

Pengembang Mata Kuliah

Penulis *Handout*

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

(Sekar Purbarini K., S.IP)
NIP.132313274

Handout 8: Pertemuan 15

Pokok Bahasan :
Tujuan Perkuliahan : Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, cara mengevaluasi globalisasi

Uraian :

- Globalisasi didefinisikan sebagai "semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global".
- Di era globalisasi politik luar negeri terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara berkembang, serta antara negara berkembang dan negara maju sesuai kemampuan demi kepentingan nasional.
- Dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Indonesia lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.
 - b. Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta menjadi pasar empuk bagi negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
 - c. Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana, masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan tersebut.
 - d. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia. Hal-hal yang harus kita waspandai tentu saja yang bersifat negatif.
- Hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.
- Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara RI mutlak harus dipertahankan dan diimplementasikan secara benar.

Tugas: Bagaimana sikap kalian sebagai calon guru SD dalam menghadapi dampak globalisasi?

Yogyakarta, September 2008
Pengembang Mata Kuliah
Penulis *Handout*

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA

No. PSM/FIP/01

Revisi : 00

Tgl : 2 Sept 2009

Hal 1 dari 4

(Sekar Purbarini K., S.IP)
NIP.132313274

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :